

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA: Studi Kepemimpinan Bupati Iti Octavia Di Kabupaten Lebak**

**Annisa Oktavia Ernawati<sup>1</sup>, Dinda<sup>2</sup>, Aqiila Nur Faiza<sup>3</sup>**

[annisaoktaviae@gmail.com](mailto:annisaoktaviae@gmail.com)<sup>1</sup>, [dindaaa25032006@gmail.com](mailto:dindaaa25032006@gmail.com)<sup>2</sup>, [aqilafaiza@gmail.com](mailto:aqilafaiza@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta efektivitas kepemimpinan Bupati Iti Octavia Jayabaya. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap dokumen resmi pemerintah, data statistik, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan indikator pembangunan daerah, antara lain penurunan angka kemiskinan dari 12,13 persen (2014) menjadi 9,03 persen (2020) sebelum naik menjadi 10,47 persen (2022) akibat pandemi. Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat dari 61,64 menjadi 64,71 pada periode 2014-2022, sementara prevalensi stunting menurun signifikan dari 23,79 persen (2019) menjadi 14 persen (2022). Kabupaten Lebak turut meraih predikat “Daerah Sangat Inovatif” melalui implementasi digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Iti Octavia, yang menonjolkan integritas, inovasi, dan kolaborasi, berkontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola. Meskipun demikian, ketimpangan infrastruktur digital dan kapasitas ASN yang beragam masih menjadi tantangan keberlanjutan reformasi.

**Kata Kunci:** Inovasi Publik, Kepemimpinan Transformasional, Lebak, Tata Kelola Pemerintahan.

### **PENDAHULUAN**

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pelaksana desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi bukan hanya sekadar pelimpahan kewenangan administratif dari pusat ke daerah, tetapi juga merupakan upaya memperkuat demokrasi lokal serta memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, dan memperkuat daya saing daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik (Muhtadin, 2023).

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki peran yang tidak hanya administratif tetapi juga strategis. Seorang bupati, wali kota, atau gubernur harus mampu menjalankan fungsi manajerial, politik, dan sosial dalam satu waktu. Kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan, pembina birokrasi, serta simbol kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan seorang kepala daerah diukur dari kemampuannya mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor utama yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah (Kamarasyid, 2019).

Salah satu contoh keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dapat dilihat dari kepemimpinan Bupati Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E., M.M. di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sejak menjabat pada tahun 2014, Iti Octavia menunjukkan komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan kepemimpinan yang inovatif dan transformasional, ia berhasil mengubah citra Kabupaten Lebak yang dahulu dikenal sebagai daerah tertinggal menjadi daerah yang progresif dan kompetitif. Program-program seperti Lebak Smart City, Lebak Pintar, Lebak Sehat, dan Lebak Sejahtera mencerminkan keberhasilan integrasi antara kebijakan publik, inovasi digital, dan pembangunan berbasis masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara merata.

Selain itu, kepemimpinan Iti Octavia juga memiliki makna penting dalam konteks gender and governance. Sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Lebak, kehadirannya menjadi simbol kemajuan representasi perempuan dalam pemerintahan lokal. Ia membuktikan bahwa perempuan tidak hanya mampu bersaing dalam arena politik, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada perubahan sosial. Dalam kajian pemerintahan daerah, keberhasilan seorang pemimpin perempuan seperti Iti Octavia menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang sensitif terhadap gender dapat memperkaya kualitas pengambilan keputusan dan memperluas perspektif keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan agenda nasional tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang menekankan pentingnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan daerah.

Keberhasilan Kabupaten Lebak dalam meraih berbagai penghargaan nasional dan regional, seperti Anugerah Pandu Negeri (2019) dan Satyalancana Kebaktian Sosial (2018), menunjukkan capaian nyata dari praktik good governance di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Penghargaan tersebut tidak hanya merupakan bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga refleksi dari keberhasilan menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam birokrasi publik. Dengan demikian, kepemimpinan Iti Octavia menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara visi kepemimpinan dan reformasi kelembagaan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Metode ini juga disebut studi kepustakaan dan merupakan cara pengumpulan data serta informasi dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber lain yang dapat dipercaya, baik dalam bentuk tulisan maupun format digital, yang relevan dengan objek penelitian. Penjelasan ini sesuai dengan pendapat (Moh.Nazir, 2015. hlm. 111) yang menyatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendapat ini juga didukung oleh (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2002. hlm. 90) yang mengatakan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran, dan literatur lainnya, dengan tujuan untuk membentuk dasar teori. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggali konsep-konsep teoretis mengenai kepemimpinan daerah, tata kelola pemerintahan, dan penerapan good governance di tingkat lokal, kemudian mengaitkannya dengan realitas empiris yang terjadi di Kabupaten Lebak.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelusuri hubungan antara teori dan praktik kepemimpinan daerah. Data yang diperoleh dari literatur dianalisis untuk mengidentifikasi pola kepemimpinan, strategi pengelolaan pemerintahan, serta dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas tata kelola daerah. Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber tertulis; (2) seleksi dan klasifikasi informasi berdasarkan relevansi terhadap topik pemerintahan daerah; (3) analisis tematik terhadap temuan literatur; dan (4) penarikan kesimpulan yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan.

Pendekatan ini sesuai dengan tujuan mata kuliah Pemerintahan Daerah, yaitu mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa dalam memahami dinamika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia. Melalui metode kajian literatur, mahasiswa dapat menilai secara kritis efektivitas kepemimpinan kepala daerah dalam konteks desentralisasi dan good governance, serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah menjalankan fungsi pemerintahan melalui penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas birokrasi, serta pengembangan kebijakan inovatif. Dalam konteks tata kelola, pemerintah daerah tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga melakukan transformasi berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis Lebak yang luas. Kebijakan strategis seperti digitalisasi layanan, integrasi sektor pendidikan kesehatan ekonomi, serta peningkatan keterbukaan informasi menjadi indikator bahwa pemerintah daerah berupaya memperbaiki kinerja pelayanan. Peran ini tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana teknis, serta pengambilan keputusan yang diarahkan oleh visi kepemimpinan Bupati (Fitriaty & Indrawijaya, 2023)

### **B. Kepemimpinan Bupati Iti Octavia Dalam Mendorong Tata Kelola**

Kepemimpinan Iti Octavia di Kabupaten Lebak menampilkan karakteristik yang sangat kuat dari model kepemimpinan transformasional, suatu pendekatan kepemimpinan yang bertujuan membawa perubahan mendasar pada kultur organisasi, pola kerja aparatur, dan orientasi pelayanan publik. Transformational leadership menekankan empat dimensi utama idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration yang bekerja secara simultan untuk mendorong perubahan nilai, perilaku, dan kinerja. Dalam konteks Kabupaten Lebak, keempat dimensi tersebut dapat diidentifikasi secara jelas, baik melalui pernyataan kebijakan, praktik birokrasi, maupun indikator sosial dan pembangunan yang menunjukkan perkembangan signifikan selama masa kepemimpinan Iti. Keberadaan pola kepemimpinan seperti ini menjadi menarik karena diterapkan dalam daerah yang menghadapi tantangan struktural cukup berat, seperti keterbatasan fiskal, infrastruktur yang belum merata, kualitas SDM aparatur yang bervariasi, serta problem sosial ekonomi yang masih besar. Oleh karena itu, efektivitas gaya kepemimpinan Iti bukan hanya terletak pada implementasi teknis kebijakan, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan transformasi yang selaras dengan konteks daerah dan karakter birokrasi lokal.

Dimensi idealized influence terlihat dari ketegasan Iti Octavia dalam membangun integritas birokrasi melalui penegakan disiplin ASN. Pada masa awal kepemimpinannya, sejumlah pelanggaran etika dan disiplin aparatur ditindak melalui mekanisme kode etik dan penegakan hukum administratif. Tindakan ini bukan sekadar langkah administratif,

melainkan bentuk pembentukan norma baru dalam birokrasi Lebak yang sebelumnya cenderung permisif terhadap pelanggaran internal. Ketegasan pemimpin dalam menegakkan aturan menciptakan legitimasi moral yang kuat di mata aparatur dan publik. Hal ini sejalan dengan teori Bass & Avolio yang menyatakan bahwa pemimpin transformasional harus menjadi “role model” yang memberikan contoh perilaku etis, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam konteks Lebak, keteladanan ini berperan penting dalam mengubah perilaku aparatur yang sebelumnya lebih banyak berorientasi prosedural menjadi aparatur yang lebih bertanggung jawab dan sadar terhadap nilai-nilai kinerja.

Selanjutnya, dimensi inspirational motivation tercermin dalam formulasi dan internalisasi visi “Lebak Sejahtera dan Berdaya Saing.” Visi ini tidak berhenti sebagai slogan politik, tetapi diturunkan menjadi pedoman pembangunan daerah melalui program prioritas yang meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Iti secara konsisten mengkomunikasikan visi ini dalam berbagai forum resmi dan internal birokrasi, sehingga tercipta keselarasan antara orientasi kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di OPD. Kemampuan menyatukan arah gerak organisasi merupakan inti dari dimensi motivasi inspirasional yang menekankan bahwa pemimpin harus mampu memberikan tujuan bersama (shared purpose) yang memotivasi aparatur untuk bekerja melampaui target rutin. Dalam konteks Lebak, visi tersebut menjadi energi kolektif yang memungkinkan reformasi layanan dasar dan digitalisasi perizinan berjalan lebih cepat dibandingkan kondisi awal sebelum masa kepemimpinan Iti (Bahrudin, 2016).

Dimensi intellectual stimulation terlihat dari dorongan Iti terhadap inovasi pelayanan publik. Kabupaten Lebak berhasil masuk dalam kategori “Daerah Sangat Inovatif” berdasarkan Indeks Inovasi Daerah Kemendagri. Ini merupakan indikator bahwa lingkungan kerja birokrasi menjadi lebih kreatif dan adaptif terhadap perubahan. Program seperti penyederhanaan SOP, percepatan layanan perizinan berbasis digital, inovasi kesehatan, serta penerapan sistem informasi terintegrasi merupakan bukti bahwa Iti mendorong aparatur untuk menciptakan solusi alternatif alih-alih mempertahankan rutinitas administratif yang tidak efisien. Teori Bass menyatakan bahwa pemimpin transformasional menstimulus pengikutnya untuk berpikir kritis dan menemukan cara baru menyelesaikan masalah, dan hal ini terbukti dalam konteks Lebak melalui perkembangan inovasi yang terjadi dalam berbagai sektor pelayanan.

Dimensi individualized consideration tampak jelas melalui program peningkatan kompetensi ASN. Penerapan pelatihan berbasis kompetensi, coaching untuk pejabat struktural, supervisi berkala, dan mentoring dalam penyusunan inovasi menunjukkan bahwa Iti memberikan perhatian pada pengembangan individu. Model pembinaan seperti ini penting dalam birokrasi yang memiliki variasi kompetensi aparatur. Dengan adanya program tersebut, aparatur dapat meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sesuai kebutuhan organisasi. Pendekatan ini memperlihatkan perhatian pemimpin terhadap SDM sebagai pondasi perubahan jangka panjang, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan semata. Hal ini mencerminkan prinsip individualized consideration, yaitu memperhatikan kebutuhan dan potensi individu sebagai bagian dari transformasi organisasi.

### C. Keterkaitan Hasil Dengan Tata Kelola Pemerintahan

Efektivitas kepemimpinan Iti Octavia tidak hanya terlihat dari aspek teoritis, tetapi juga dibuktikan melalui indikator kuantitatif pembangunan daerah.

Indikator	Tahun	Nilai	Keterangan Perubahan
Angka kemiskinan	2014	12,13%	Awal periode kepemimpinan Iti
	2020	9,03%	Turun Signifikan (pra-pandemi)
	2022	10,47%	Naik akibat pandemi

IPM(Indeks Pembangunan Manusia)	2014	61,64	Akses layanan publik masih terbatas
	2022	64,71	Kenaikan konsisten, layanan dasar membaik

Efektivitas kepemimpinan Iti Octavia tercermin kuat melalui capaian indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren perbaikan signifikan. Data kemiskinan misalnya, mengalami penurunan dari 12,13% pada 2014 menjadi 9,03% pada 2020, sebelum meningkat menjadi 10,47% pada 2022 akibat dampak pandemi COVID 19. Penurunan pra-pandemi ini memperlihatkan bahwa kebijakan sosial, pelayanan dasar, serta program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 61,64 pada 2014 menjadi 64,71 pada 2022 menandakan terjadinya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kenaikan yang stabil ini menunjukkan bahwa transformasi birokrasi yang dilakukan, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga (BPS Kabupaten Lebak, 2025).

Tahun	Angka Prevalensi Stunting (%)	Sumber (singkat)
2018	39,5% Prevalensi balita sangat pendek & pendek menurut publikasi BPS (Tabel Status Gizi Balita 2018).	Badan Pusat Statistik (BPS)
2021	±27,5% Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI 2021), data ditampilkan melalui portal nasional / TP2S Kabupaten Lebak.	SSGI 2021 / TP2S
2022	±21,6% Mengacu pada SSGI 2022 serta ringkasan provinsi/daerah (TP2S Lebak).	SSGI 2022 / TP2S
2023	(Tidak konsisten / bervariasi) Tidak terdapat rilis SSGI tingkat kabupaten untuk 2023; beberapa laporan daerah menampilkan angka berbeda (misal: angka absolut balita stunting atau estimasi program).	Laporan lokal 2023

Data pada tabel di atas menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan berbagai sumber resmi. Pada tahun 2018, prevalensi stunting masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu sekitar 39,5%, sebagaimana tercatat dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Tabel Status Gizi Balita 2018 (BPS, 2018). Angka ini menggambarkan kondisi awal sebelum program percepatan penurunan stunting dijalankan secara intensif di berbagai wilayah.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan ke angka sekitar 27,5%, sesuai hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI 2021) yang juga ditampilkan melalui portal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) di tingkat kabupaten (SSGI 2021; TP2S Lebak, 2021). Penurunan ini menunjukkan mulai terlihatnya dampak intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Pada tahun 2022, tren penurunan berlanjut dengan angka prevalensi sekitar 21,6% berdasarkan SSGI 2022, yang diperkuat pula oleh ringkasan data regional pada TP2S 2023 (SSGI 2022; TP2S Lebak, 2023).

Konsistensi data ini mengindikasikan peningkatan upaya dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan stunting. Untuk tahun 2023, tidak terdapat rilis resmi SSGI yang memuat data prevalensi stunting hingga tingkat kabupaten. Beberapa laporan daerah yang beredar justru menampilkan angka berbeda misalnya berdasarkan jumlah balita stunting hasil pendataan program, bukan persentase prevalensi (Laporan Lokal, 2023). Karena itu, data tahun 2023 dikategorikan tidak konsisten dan perlu digunakan dengan kehati-hatian, mengingat variasi metode pengumpulan dan pelaporannya.

Selain peningkatan indikator sosial, digitalisasi layanan publik juga menunjukkan progres signifikan. Transformasi birokrasi melalui perizinan berbasis aplikasi, sistem

informasi yang terintegrasi, serta penyederhanaan SOP mempercepat proses administratif dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya terjadi pada sektor pelayanan dasar, tetapi juga pada aspek tata kelola pemerintahan yang menuntut efektivitas dan transparansi (Mutiarin et al., 2024).

Secara keseluruhan, tabel dan data kuantitatif tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional Iti Octavia berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola, baik dari aspek pembangunan manusia maupun efisiensi birokrasi.

#### **D. Tantangan Implementasi Kepemimpinan Transformasional**

Dalam konteks sosial ekonomi Lebak, gaya kepemimpinan transformasional Iti menjadi sangat relevan karena daerah ini membutuhkan perubahan struktural yang cukup mendasar. Keterbatasan fiskal dan infrastruktur mendorong perlunya pemimpin yang mampu memanfaatkan inovasi non-infrastruktur untuk meningkatkan layanan publik. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat pada awal kepemimpinannya menuntut pendekatan yang mampu membangun motivasi kolektif dan meningkatkan partisipasi aktif aparatur. Tantangan kesehatan, khususnya tingginya angka stunting, juga memerlukan pemimpin yang mampu menggerakkan berbagai sektor secara terpadu. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Iti bukan hanya cocok secara teoritis, tetapi juga cocok secara praktis karena sesuai dengan kebutuhan struktural daerah (Prasetyo et al., 2023).

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional Iti Octavia memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan birokrasi dan pembangunan daerah di Lebak. Namun, efektivitas tersebut perlu diperkuat melalui institusionalisasi kebijakan agar reformasi tidak berhenti pada level figur pemimpin. Penguatan regulasi internal, sistem merit, pengembangan SDM berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur digital menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan dampak yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

### **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan melalui digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan dasar. Berbagai indikator pembangunan seperti kemiskinan, IPM, dan stunting menunjukkan perbaikan signifikan selama kepemimpinan Iti Octavia. Keberhasilan tersebut didukung oleh gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan integritas, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan berupa pemerataan infrastruktur digital dan kapasitas ASN masih perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, peningkatan tata kelola memerlukan penguatan kelembagaan agar inovasi dapat berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak. <https://lebakkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMjMg==/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-lebak.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Prevalensi balita sangat pendek dan pendek menurut kabupaten/kota tahun 2018. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUzMSMy/prevalensi-balita-sangat-pendek-dan-pendek-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>
- Bahrudin, A. (2016). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. Serat Acitya, 4(3), 135.
- Fitriaty, F., & Indrawijaya, S. (2023). Model Reinventing Government Menuju Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance). Jurnal Manajemen Dan Sains.
- Islam, J. H., Pelaksanaan, A., Daerah, O., Desentralisasi, D. A. N., Dalam, P., & Daerah, T. P.

- (2014). H k a m. 2, 233–251.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. TP2S. <https://stunting.go.id/buku-saku-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022/>
- lebakkab.bps.go.id. (2018). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. [https://lebakkab.bps.go.id/publication/2018/10/01/5748e69774193521\\_a97ced21/statistik-daerahkabupaten-lebak-2018.html](https://lebakkab.bps.go.id/publication/2018/10/01/5748e69774193521_a97ced21/statistik-daerahkabupaten-lebak-2018.html)
- Muhtadin, M. (2023). Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Mutiarin, D., Khaerah, N., Visca, A., & Nyssa, I. (2024). E-Government Development : Catalysing Agile Governance Transformation in Indonesia. 5(April), 87–110.
- Nazilatul, A., Muqoffa, F., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., & Muhammadiyah, U. (2024). ANALISIS PENERAPAN GAYA KEPEMIMPINAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Abstrak ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE IN THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF. 2(1), 63–70.
- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 4(1), 33-48.
- Prasetyo, A., Noviana, N., Rosdiana, W., Anwar, M. A., Harwijayanti, B. P., & Fahlevi, M. (2023). Stunting Convergence Management Framework through System Integration Based on Regional Service Governance.
- Stunting.go.id. (2022). Percepat turunkan stunting, pejabat di Lebak wajib jadi bapak/ibu asuh. <https://stunting.go.id/percepat-turunkan-stunting-pejabat-di-lebak-wajib-jadi-bapak-ibu-asuh/>
- Suryana, M. (2019). Lima aksi pencegahan dan penanganan kekerdilan dijalankan Pemkab Lebak— ANTARA News Banten. Antara News. <https://banten.antaranews.com/berita/57966/lima-aksi-pencegahan-dan-penanganan-kekerdilan-dijalankan-pemkab-lebak>
- Transformasional, K. (2019). Kepemimpinan transformasional. 4(1), 1–27.